

VISI

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

VOLUME 2

NOMOR 3

MEI 1991

**PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH SUMATERA UTARA
DILIHAT DARI ANGKA MIGRASI SEMASA HIDUP**

Elvis Purba, Sabam Simbolon, Marudut Manalu

**IDENTIFIKASI KEMISKINAN DI DESA HUTANAMORA
KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Jongkers Tampubolon, Jan Piet van der Mijl

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA**

Maju P. L. Tobing

**PENDEKATAN EVALUASI POTENSI EKOSISTEM HUTAN
MELALUI KANDUNGAN UNSUR-UNSUR KIMIA
PENTING DALAM TANAH**

M. Weiss Nainggolan

**PENGGUNAAN ECENG GONDOK (*Eichhornia crassipes* Mart)
DALAM MENURUNKAN KADAR FENOLIK PADA LIMBAH
INDUSTRI FARMASI**

Hasan Sitorus

PEMBEBANAN MANUSIA DALAM SISTEM KERJA

Soaduon Sibarani

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH SUMATERA UTARA DILIHAT DARI ANGKA MIGRASI SEMASA HIDUP.

Oleh: **Elvis Purba**
Sabam Simbolon
Marudut Manalu

ABSTRACT

It is argued that migrants are more likely to move to the areas which have higher economic development, this paper attempts to analyze the relationship between life-time migration of North Sumatra and the level of economic growth of the provinces in Indonesia, especially in 1980 and 1985.

The findings show that the hypothesis is supported. It was found that the number of lifetime in-migrants in North Sumatra decreased when the level of economic growth in this area was lower than in several other provinces. At the same time, the number of lifetime out-migrants increased. Generally, the migrants moved to the provinces which had higher economic development.

1. PENDAHULUAN

Program redistribusi penduduk yang dilakukan oleh pemerintah yang dikenal dengan istilah "Transmigrasi" dibarengi dengan penggalakan pembangunan dalam berbagai bidang, antara lain, dapat menjadi penyebab terjadinya peningkatan mobilitas penduduk antar daerah di Indonesia.

Keluarga yang dipindahkan tersebut dapat memancing perpindahan sanak-saudara secara swakarsa sehingga arus perpindahan penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu bukti yaitu adanya migran semasa hidup pada berbagai daerah di Indonesia.

Dari data Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, dan SUPAS 1985 diketahui bahwa banyak penduduk yang dicacah di suatu propinsi yang tidak dilahirkan pada propinsi bersangkutan. Pada tahun-tahun tersebut di atas, untuk seluruh Indonesia dicatat sebanyak 5.703.037 jiwa, 9.971.785 jiwa dan 11.465.558 jiwa, sedang untuk propinsi Sumatera Utara sebanyak 547.405 jiwa, 561.786 jiwa, dan 485.155 jiwa.

Pokok pikiran dalam menganalisis migran semasa hidup, yakni jika angka migran semasa hidup di suatu daerah semakin banyak, ada kecenderungan bahwa pembangunan di daerah bersangkutan meningkat. Pada pihak lain, jika angka migran cenderung turun, berarti peningkatan pembangunan di daerah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain atau dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang antara lain dapat dilihat dari angka PDRB dan/atau PDRB perkapita.

Dalam tulisan ini akan ditunjukkan perkembangan migrasi semasa hidup, khususnya dari Sumatera Utara. Pembahasan terutama dibatasi dalam periode 1980-1985, karena jumlah migran semasa hidup di propinsi Sumatera Utara cenderung turun, yang keluar dari daerah ini dan untuk tingkat nasional dalam periode yang sama cenderung naik. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan, khususnya di propinsi Sumatera Utara di masa mendatang.

2. KONSEP PERHITUNGAN ANGKA MIGRAN SEMASA HIDUP

Dalam Sensus Penduduk 1971 dan 1980, antara lain terdapat pertanyaan tentang "Tempat Lahir" penduduk. Kemudian dalam SUPAS 1985, pertanyaan yang sama juga ditemukan.

Berdasarkan pertanyaan tersebut diperoleh data tentang migrasi semasa hidup, di mana seseorang dapat disebut sebagai seorang migran apabila orang tersebut melintasi batas wilayah propinsi dan bertempat tinggal di propinsi tujuan sekurang-kurangnya tepat 6 bulan. Dalam pada

itu, angka migran semasa hidup adalah jumlah penduduk yang pada waktu pencacahan bertempat tinggal di luar propinsi tempat kelahirannya.

Migrasi semasa hidup tidak mencakup semua penduduk yang pernah pindah. Lain halnya dengan migrasi total, yang mencakup semua penduduk yang pernah pindah. Penduduk yang pernah pindah dari tempat kelahirannya, tetapi pada waktu pencacahan telah pindah kembali ke daerah kelahirannya dihitung sebagai migran total. Dengan demikian, migrasi total mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi kembali. Atau dengan kata lain, migran semasa hidup adalah selisih antara migran total dengan migran kembali.

3. MIGRASI SEMASA HIDUP ANTAR PROPINSI

Dalam Tabel 1 disajikan gambaran tentang persentase migran semasa hidup menurut propinsi tahun 1971, 1980, dan 1985. Dari tabel tersebut dapat dibandingkan intensitas migrasi keluar dari dan migrasi masuk ke masing-masing propinsi, dan pergeseran arah migrasi tersebut dari tahun 1971, 1980, dan 1985.

Jumlah migran semasa hidup tahun 1971, 1980, dan 1985 masing-masing sekitar 4,8%, dan 6,8%, dan 7,0% dari jumlah penduduk Indonesia periode tersebut.

Beberapa hal yang dapat diungkapkan dari Tabel 1, antara lain menyangkut migrasi masuk, migrasi keluar dan migrasi neto.

3.1. Migrasi Masuk

Migrasi masuk baik tahun 1971 dan 1980, maupun tahun 1985, hanya terpusat pada dua propinsi, yaitu DKI Jakarta dan Lampung masing-masing di atas 30%. Persentase migrasi masuk untuk kedua-dua daerah tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. DKI Jakarta mempunyai lokasi sentral, selain itu, sebagai tempat mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan. Dari penelitian Temple (1986) disimpulkan bahwa para migran memilih Jakarta karena kota ini memberi harapan paling besar untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Di lain pihak, propinsi Lampung mempunyai proporsi migrasi masuk tertinggi setelah DKI Jakarta, baik tahun

Tabel 1

Migran Semasa Hidup Menurut Propinsi
Tahun 1971, 1980 dan 1985

No.	Propinsi	Migran masuk			Migran keluar			Migran neto		
		1971	1980	1985	1971	1980	1985	1971	1980	1985
1.	D.I. Aceh	3,0	5,5	5,4	3,3	4,4	4,0	-0,3	1,0	1,4
2.	Sumatera Utara	8,0	6,6	5,0	2,9	5,0	6,0	5,1	1,6	-1,0
3.	Sumatera Barat	3,1	3,9	3,7	11,6	16,4	15,1	-8,5	-12,6	-11,4
4.	R i a u	12,5	15,9	12,3	2,6	4,0	3,7	9,9	11,9	8,6
5.	Jambi	15,6	20,4	19,6	2,7	3,3	2,9	12,9	17,1	16,7
6.	Sumatera Selatan	9,5	13,2	10,7	5,8	7,2	6,9	3,7	6,0	3,8
7.	Bengkulu	6,9	15,8	12,7	4,8	5,1	4,2	2,1	10,7	8,5
8.	Lampung	36,1	38,6	31,5	1,1	1,2	1,9	35,0	37,4	29,6
9.	DKI Jakarta	39,7	39,8	38,9	2,9	6,2	7,5	36,8	33,6	31,4
10.	Jawa Barat	1,7	3,5	4,4	5,5	5,4	5,4	-3,8	-1,9	-1,0
11.	Jawa Tengah	1,2	1,3	1,9	8,2	12,7	12,3	-7,0	-11,4	-10,4
12.	DI. Yogyakarta	4,0	6,4	7,8	10,7	9,2	22,4	-6,7	-2,8	-14,6
13.	Jawa Timur	1,1	1,5	1,8	2,9	5,5	5,8	-1,8	-4,0	-4,0
14.	B a l i	1,0	2,6	2,0	2,7	4,8	6,0	-1,7	-2,2	-4,0
15.	N.T.B.	1,5	1,9	2,0	0,6	1,6	1,4	0,9	0,3	0,6
16.	N.T.T.	0,4	1,3	1,4	1,1	1,7	1,9	-0,7	-0,5	-0,5
17.	Timor Timur	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,6
18.	Kalimantan Barat	1,0	4,2	2,9	1,7	2,9	2,6	-0,7	1,3	0,3
19.	Kalimantan Tengah	7,1	14,7	12,3	1,6	2,6	3,2	5,5	12,1	9,1
20.	Kalimantan Selatan	3,9	6,9	8,0	5,0	8,2	8,6	-1,1	-1,3	-0,6
21.	Kalimantan Timur	5,4	24,1	25,3	3,2	2,8	3,2	2,2	21,3	22,1
22.	Sulawesi Utara	2,8	4,2	3,2	3,5	5,7	6,5	-0,7	1,6	-3,3
23.	Sulawesi Tengah	5,6	14,4	11,2	3,8	2,6	2,1	1,8	11,7	9,1
24.	Sulawesi Selatan	1,3	1,8	1,9	4,7	8,5	8,2	-3,4	-6,7	-6,3
25.	Sulawesi Tenggara	3,6	11,1	14,3	4,3	9,6	6,1	-0,7	1,6	8,2
26.	Maluku	3,9	8,9	7,3	3,4	4,6	5,2	0,5	4,3	2,1
27.	Irian Jaya	22,3	8,4	11,3	4,3	1,4	1,9	18,0	7,0	9,4

Catatan: Persentase dihitung dari jumlah penduduk masing-masing propinsi.

Sumber: Ida Bagus Mantra, **Migrasi Penduduk di Indonesia: Berdasarkan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1985**, BPS, Jakarta, 1986/1987, hal. 19.

1971, 1980, maupun 1985. Keadaan ini berhubungan dengan program redistribusi penduduk melalui transmigrasi, untuk pertama kali dilaksanakan di Indonesia tahun 1905, yaitu dengan memindahkan penduduk dari Jawa Tengah ke Lampung. Penduduk yang pergi ke Lampung bekerja dalam bidang pertanian yang merupakan perpindahan pola pertanian sawah disertai syarat pengaturan irigasi (lihat lebih lanjut Sayogyo, 1985, hal 32 - 42). Di samping itu, faktor jarak turut mempengaruhi. Ravenstein (1885) mengatakan bahwa hampir semua migran pindah dalam jarak dekat, dan penelitian terakhir menegaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara migrasi dengan jarak (Young, 1984, hal. 109). Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, jarak antara Lampung dengan pulau Jawa sangat dekat, prasarana transportasi yang semakin memadai, baik melalui darat, laut maupun udara, di samping daerah tersebut sebagai daerah pemukiman transmigrasi memungkinkan Lampung menjadi daerah pilihan utama bagi migran, terutama yang berasal dari Jawa.

3.2. Migrasi Keluar

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase migrasi ke luar mengalami kenaikan, yaitu dari 4,8% menjadi 6,8% dan 7,0%, masing-masing tahun 1971, 1980 dan 1985 untuk Indonesia.

Di antara Daerah Tingkat I di Indonesia, propinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan mobilitas ke luar yang tinggi. Sedikitnya ada tiga faktor yang telah turut mempengaruhi migrasi orang Minangkabau, yaitu faktor geografi, ekonomi, dan pelembagaan (Naim, 1984, hal. 292). Persentase migrasi keluar tahun 1971 sebesar 11,6% menjadi 16,4% dan 15,1% tahun 1980 dan 1985.

3.3. Migrasi Neto

Selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar disebut migrasi neto. Selisih tersebut dapat berupa angka yang positif, negatif, atau mungkin juga nol. Jika hasil pengurangan tersebut memberi angka negatif berarti lebih banyak migrasi keluar daripada migrasi masuk. Sebaliknya, apabila hasilnya positif, berarti migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar, dan jika hasilnya nol, maka jumlah migrasi masuk sama dengan jumlah migrasi keluar.

DKI Jakarta dan Lampung mempunyai migrasi neto positif terbesar di antara Daerah Tingkat I lainnya. Kemudian, belakangan ini, Propinsi Kalimantan Timur dan Jambi menunjukkan migrasi neto yang positif yang agak besar. Di lain pihak, Daerah Tingkat I yang mempunyai persentase migrasi neto negatif yang besar adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dan belakangan ini juga terjadi untuk D.I. Yogyakarta.

Yang menarik perhatian adalah propinsi D.I. Aceh dan Sumatera Utara. Tahun 1971, D.I. Aceh mempunyai migrasi neto negatif, tahun 1980 dan 1985 menunjukkan angka yang positif. Diduga, keadaan tersebut erat hubungannya dengan pembangunan beberapa industri besar di daerah tersebut. Daerah Sumatera Utara lain halnya, di mana pada tahun 1971 dan 1980 menunjukkan persentase yang semakin kecil bahkan tahun 1985 sudah menjadi negatif. Artinya, tahun 1971 dan 1980 daerah ini sebagai penerima dan tahun 1985 menjadi daerah pemberi. Keadaan ini diduga erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi daerah ini.

4. SUMATERA UTARA DI ANTARA PEREKONOMIAN INDONESIA

Tiap-tiap negara atau daerah mengejar pembangunan dan merupakan suatu tujuan semua orang yang turut mengambil bagian. Kemajuan ekonomi merupakan salah satu dari beberapa komponen yang penting dari pembangunan tersebut yang semata-mata tidak hanya merupakan gejala ekonomi. Todoró (1983, hal. 103) menyatakan bahwa dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan mencakup masalah-masalah material dan finansial dalam kehidupan penduduk.

Sumatera Utara, salah satu dari dua puluh propinsi di Indonesia yang menjadi pokok analisis dalam tulisan ini perlu mendapat penekanan yang lebih besar di antara daerah lain di Indonesia. Untuk maksud tersebut, mungkin perlu lebih dahulu melihat daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengkonfrontasikannya dengan Sumatera Utara dalam hasil pembangunan ekonomi.

Pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya, didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat mening-

kat dari waktu ke waktu. Dalam hubungan ini, propinsi-propinsi di Indonesia dapat dikelompokkan menurut tingkat pendapatan perkapita di atas rata-rata dan di bawah rata-rata pendapatan perkapita Indonesia. Berdasarkan pembagian tersebut, tahun 1975 hanya tujuh Daerah Tingkat I dengan tingkat pendapatan per kapita di atas rata-rata tingkat pendapatan perkapitan Indonesia. Tahun 1980 dan 1985 masing-masing menjadi delapan dan enam Daerah Tingkat I (Tabel 2).

Beberapa hal yang menarik dari Tabel 2 adalah sebagai berikut:

4.1. Sumatera

Dari Tabel 2 jelas nampak bahwa terdapat tiga propinsi dengan tingkat pendapatan perkapita di atas rata-rata dan empat propinsi di bawah rata-rata pendapatan perkapita Indonesia untuk ketiga-tiga waktu pengamatan tersebut D.I. Aceh, tahun 1975, pendapatan perkapitanya sebesar 97 ribu dan tahun 1985 melonjak menjadi 1.624,8 ribu. Keadaan ini erat hubungannya dengan pembangunan proyek-proyek besar di daerah ini, seperti LNG Arun dan pabrik pupuk ASEAN. Daerah Riau dan Sumatera Selatan, pendapatan perkapita kedua-dua daerah ini juga berada di atas rata-rata Indonesia karena sumbangan minyak bumi terhadap PDRB-nya cukup besar. Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Lampung pada ketiga-tiga waktu pengamatan, pendapatan perkapita penduduknya tetap berada di bawah rata-rata pendapatan perkapita Indonesia. Sedangkan Sumatera Utara, tahun 1975 dan 1980 masih menunjukkan tingkat pendapatan perkapita di atas rata-rata Indonesia, tetapi tahun 1985 sudah menjadi di bawah rata-rata pendapatan perkapita Indonesia. Rendahnya pendapatan perkapita daerah ini berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

4.2. Jawa

DKI Jakarta baik tahun 1975, 1980 maupun 1985, tingkat pendapatan perkapita penduduknya tetap berada di atas rata-rata Indonesia. Kemudian, empat Daerah Tingkat I lainnya menunjukkan tingkat pendapatan perkapita di bawah rata-rata Indonesia. Akan tetapi dilihat dari PDRB-nya (kecuali D.I. Yogyakarta) berada di atas rata-rata Indonesia untuk ketiga-tiga waktu pengamatan

Tabel 2
Perbandingan PBRB Perkapita di Indonesia
Tahun 1975, 1980 dan 1985

No.	Propinsi	PBRD Perkapita (Rp.000)			1975	1980	1985
		1975	1980	1985			
1.	D.I. Aceh	97,0	276,1	1.624,8	H	H	H
2.	Sumatera Utara	94,5	131,0	395,8	H	H	L
3.	Sumatera Barat	50,2	95,9	366,0	L	L	L
4.	R i a u	984,2	780,6	2.399,7	H	H	H
5.	Jambi	76,4	94,1	349,8	L	L	L
6.	Sumatera Selatan	137,1	180,8	684,1	H	H	H
7.	Bengkulu	51,8	82,0	301,4	L	L	L
8.	Lampung	71,8	70,7	211,7	L	L	L
9.	DKI Jakarta	195,8	272,1	1.160,7	H	H	H
10.	Jawa Barat	71,0	96,8	414,2	L	L	L
11.	Jawa Tengah	56,0	72,0	298,8	L	L	L
12.	D.I. Yogyakarta	56,3	67,8	281,0	L	L	L
13.	Jawa Timur	65,6	89,9	389,3	L	L	L
14.	Kalimantan Barat	76,1	105,8	336,8	L	L	L
15.	Kalaimantan Tengah	80,9	147,9	475,8	L	H	L
16.	Kalimantan Selatan	70,4	90,4	413,8	L	L	L
17.	Kalimantan Timur	514,8	858,4	3.417,8	H	H	H
18.	Sulawesi Utara	80,0	119,3	301,9	L	L	L
19.	Sulawesi Tengah	56,2	75,0	263,0	L	L	L
20.	Sulawesi Selatan	66,5	91,4	298,3	L	L	L
21.	Selawesi Tenggara	63,8	85,2	303,0	L	L	L
22.	B a l i	68,0	112,2	406,2	L	L	L
23.	Nusa Tenggara Barat	41,1	53,3	195,2	L	L	L
24.	Nusa Tenggara Timur	38,7	53,5	182,9	L	L	L
25.	Maluku	86,8	118,3	338,0	L	L	L
26.	Irian Jaya	205,7	229,6	589,2	H	H	H
27.	Timor Timur	-	-	149,4	-	-	L
INDONESIA		92,5	121,9	480,8*)			

*) dihitung dari PDB Indonesia dibagi dengan jumlah penduduknya.
H menyatakan di atas rata-rata dan L menyatakan di bawah rata-rata
PDB perkapita Indonesia.

Sumber: BPS, Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia

1975-1979, Jakarta 1982, hal. 14-15.

, Statistik Indonesia 1986, Jakarta 1987, hal. 612-613.

, Statistik Indonesia 1988, Jakarta 1989, hal. 620-621.

Tabel 3

Perbandingan PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia
Tahun 1975-1985

No.	Propinsi	PDRB (Rp.000.000.000)			1975	1980	1985
		1975	1980	1985			
1.	D.I. Aceh	211,5	703,5	4.785,0	L	H	H
2.	Sumatera Utara	688,3	1.085,9	3.698,5	H	H	H
3.	Sumatera Barat	159,5	324,4	1.347,5	L	L	L
4.	R i a u	1.806,5	1.655,5	6.040,0	H	H	H
5.	J a m b i	86,4	134,1	601,3	L	L	L
6.	Sumatera Selatan	532,8	824,3	3.632,8	H	H	H
7.	Bengkulu	31,7	62,2	279,6	L	L	L
8.	Lampung	232,0	314,4	1.224,8	L	L	L
9.	DKI Jakarta	1.036,9	1.736,9	9.012,7	H	H	H
10.	Jawa Barat	1.720,7	2.633,9	12.671,2	H	H	H
11.	Jawa Tengah	1.289,7	1.790,2	8.033,6	H	H	H
12.	D.I. Yogyakarta	146,2	187,3	821,4	L	L	L
13.	Jawa Timur	1.770,3	2.871,5	12.131,0	H	H	H
14.	Kalimantan Barat	147,4	260,9	941,3	L	L	L
15.	Kalimantan Tengah	63,8	136,9	525,6	L	L	L
16.	Kalimantan Selatan	131,4	185,2	934,8	L	L	L
17.	Kalimantan Timur	449,4	1.049,4	5.075,5	L	H	H
18.	Sulawesi Utara	149,4	241,6	704,6	L	L	L
19.	Sulawesi Tengah	56,8	93,1	392,6	L	L	L
20.	Sulawesi Selatan	358,5	551,7	1.946,6	L	L	H
21.	Sulawesi Tenggara	50,8	75,4	334,8	L	L	L
22.	B a l i	153,0	275,5	1.072,7	L	L	L
23.	Nusa Tenggara Barat	100,6	144,1	592,9	L	L	L
24.	Nusa Tenggara Timur	93,4	144,3	555,7	L	L	L
25.	Maluku	102,5	165,1	538,8	L	L	L
26.	Irian Jaya	212,4	269,5	798,3	L	L	L
27.	Timor Timur	-	-	93,4	-	-	L
INDONESIA		11.801,0	17.917,0	78.787,0			
Rata-rata Indonesia		453,9	689,1	2.918,0 *)			

*) Dihitung dari jumlah PDB dibagi dengan banyaknya propinsi yang memberi sumbangan.

H Menyatakan di atas rata-rata dan L menyatakan di bawah rata-rata PDB Indonesia.

Sumber: BPS, Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia 1975-1979, Jakarta, 1987, hal. 610-611.
, Statistik Indonesia 1988, Jakarta 1989, hal. 619-620.

tersebut (lihat Tabel 3). Rendahnya pendapatan perkapita daerah-daerah tersebut disebabkan jumlah penduduknya yang sangat besar.

4.3. Wilayah Indonesia Lainnya

Kalimantan Timur dan Irian Jaya untuk ketiga-tiga waktu pengamatan menunjukkan pendapatan perkapita di atas rata-rata Indonesia. Daerah Tingkat I lainnya (kecuali Kalimantan Tengah tahun 1980) memperlihatkan pendapatan perkapita di bawah rata-rata Indonesia. Untuk Kalimantan Timur, keadaan tersebut erat hubungannya dengan perkembangan industri di daerah tersebut, dan untuk Irian Jaya erat kaitannya dengan sumbangan sektor pertambangan terhadap PDRB-nya.

Dilihat dari Tabel 2 dan Tabel 3, dapat dikatakan bahwa di daerah Sumatera Utara peningkatan hasil pembangunan akhir-akhir ini lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Suparman I.A. (1985, hal. 39), misalnya, menunjukkan Indeks Pembangunan (IP) 26 propinsi di Indonesia dengan menggunakan metode rata-rata sederhana dan metode Guttman tahun 1980. Di antara propinsi yang ada di Sumatera, kecuali Bengkulu, Daerah Tingkat I lainnya mempunyai Indeks Pembangunan (kota + desa) di atas indeks pembangunan Sumatera Utara.

5. MIGRASI SEMASA HIDUP SUMATERA UTARA

Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pendahuluan, maka pembahasan tentang migrasi semasa hidup dibatasi dalam periode 1980-1985. Dalam pembahasan migrasi semasa hidup, setidaknya-tidaknya dapat diketahui jumlah dan arah migrasi semasa hidup, baik yang masuk dan keluar dari suatu daerah serta migrasi semasa hidup neto. Migran yang masuk ke Sumatera Utara adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah ini tetap tempat kelahirannya di propinsi lain, dan migran yang keluar adalah penduduk yang lahir di daerah ini tetap bertempat tinggal di luar propinsi Sumatera Utara.

5.1. Migrasi Semasa Hidup Masuk

Berdasarkan data Sensus Penduduk 1980 dan SUPAS 1985 dicatat penduduk Sumatera Utara yang lahir di propinsi lain di Indonesia sebanyak 561.786 jiwa dan 485.155 jiwa. Propinsi tempat lahir penduduk tersebut umumnya di Pulau Jawa dan Sumatera, masing-masing di atas 60 persen dan 20 persen untuk kedua-dua waktu pengamatan tersebut di atas. Secara keseluruhan, migran masuk yang lahir di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan kecenderungan menurun sedangkan yang lahir di Sumatera Utara tetapi masih di Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan (Tabel 4).

Daerah asal migran semasa hidup yang dicatat di Sumatera Utara terutama berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur di Pulau Jawa serta Sumatera Barat dan D.I. Aceh di Sumatera. Daerah Tingkat I lainnya menunjukkan proporsi hanya di bawah 5 persen tahun 1980, bahkan tahun 1985 terdapat beberapa propinsi yang bukan menjadi tempat lahir migran semasa hidup masuk ke Sumatera Utara (lihat Tabel 4). Besarnya persentase migran masuk asal Jawa Tengah dan Jawa Timur diduga, selain sebagai transmigran juga sebagai pekerja-pekerja di perkebunan besar di Sumatera Utara. "Sejarah perpindahan penduduk dari Jawa, khususnya ke Sumatera Utara, kebanyakan mereka adalah kuli kontrak pada perkebunan-perkebunan di masa Belanda" (Abdulrochim, 1986, hal. 17). Mereka, umumnya tinggal di daerah pedesaan (Tabel 5). Mantra (1988) menjelaskan bahwa migran yang menuju kota pada umumnya mempunyai kegiatan di bidang bukan pertanian dan yang menuju pedesaan mempunyai aktivitas di bidang pertanian.

Everett Lee (1966) mengemukakan bahwa besar kecilnya jumlah migrasi dipengaruhi oleh adanya faktor pendorong di daerah asal, faktor penarik dari daerah tujuan, jarak antara kedua daerah tersebut, dan faktor individu migran itu sendiri (Basnafdi, 1989, hal. 10). Karena sifat-sifat khusus dari penduduk berbeda, maka banyaknya migran yang masuk ke daerah Sumatera Utara dapat berbeda menurut tiap propinsi.

Migran yang berasal dari Sumatera Barat dan D.I. Aceh diduga, selain kedua-dua daerah tersebut dekat ke Sumatera Utara juga karena motif ekonomi dan motif pendidikan. Migran dari Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan

Tabel 4

Migran Masuk Menurut Propinsi Tempat Lahir

Tempat Lahir	1980		1985	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1. D.I. Aceh	62.770	11,17	66.171	13,64
2. Sumatera Barat	75.221	13,39	83.248	17,16
3. Riau	12.576	2,24	8.156	1,68
4. Jambi	1.474	0,26	-	-
5. Sumsel	5.707	1,06	3.831	0,79
6. Bengkulu	489	0,08	335	0,07
7. Lampung	757	0,13	914	0,19
Sumatera	158.974	28,30	162.655	33,53
8. DKI Jakarta	9.896	1,76	13.695	2,82
9. Jawa Barat	26.032	4,63	24.035	4,95
10. Jawa Tengah	261.735	46,59	179.246	36,95
11. D.I. Yogyakarta	3.704	0,66	17.557	3,61
12. Jawa Timur	77.851	13,86	68.689	14,16
13. Bali	856	0,15	668	0,14
Jawa dan Bali	380.074	67,66	303.870	62,63
14. Nusa Tenggara	381	0,07	-	-
15. Kalbar	907	0,16	-	-
16. Kalteng	210	0,04	-	-
17. Kalsel	1.526	0,27	2.037	0,42
18. Kaltim	772	0,14	2.161	0,45
19. Sulawesi Utara	1.022	0,18	1.002	0,21
20. Sulawesi Tengah	495	0,09	-	-
21. Sulawesi Selatan	2.074	0,37	688	0,14
22. Sultra	286	0,05	-	-
23. Maluku	580	0,10	688	0,14
24. Irian Jaya	274	0,05	-	-
25. Timor Timur	140	0,02	-	-
26. Luar Negeri	14.051	2,50	12.094	2,49
Jumlah	561.786		485.155	

Sumber: BPS,

Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 1980, Seri S, No. 2, Jakarta, 1983, Tabel 5 - 2.

Survei Penduduk Antar Sensus, 1985, Jakarta, 1987, Tabel I - 2.

Tabel 1
Migran Semasa Hidup Masuk Menurut Daerah Tujuan di Sumatera Utara
1980 - 1985

D A T A I	Kota				Pedesaan			
	1980		1985		1980		1985	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. D.I. Aceh	37.935	19,06	45.479	20,18	24.835	6,84	20.692	7,97
2. Sumbar	62.282	31,35	77.888	34,56	12.939	3,56	5.360	2,06
3. Riau	10.494	5,21	6.694	2,97	2.082	0,57	1.462	0,56
4. Jambi	1.010	0,51	-	-	464	0,13	-	-
5. Sumsel	3.498	1,71	3.344	1,48	2.209	0,61	487	0,19
6. Bengkulu	294	0,15	335	0,15	195	0,05	-	-
7. Lampung	384	0,19	670	0,30	373	0,10	244	0,09
Sumatera	115.897	58,34	134.410	59,63	43.097	11,87	28.245	10,87
8. DKI Jakarta	7.333	3,66	10.039	4,45	2.563	0,71	3.656	1,41
9. Jawa Barat	10.527	5,30	14.042	6,23	15.505	4,27	9.993	3,85
10. Jawa Tengah	33.197	16,71	26.437	11,73	228.538	62,94	152.809	58,83
11. D.I. Yogyakarta	1.072	0,54	5.353	2,37	2.630	0,72	12.184	4,70
12. Jawa Timur	13.508	6,80	18.733	8,31	64.343	17,72	49.956	19,23
13. Bali	502	0,25	668	0,30	354	0,10	-	-
Jawa dan Bali	66.139	33,29	75.272	33,40	313.935	86,46	228.598	88,00
14. Nusa Tenggara	124	0,06	-	-	257	0,07	-	-
15. Kalbar	520	0,26	-	-	387	0,11	-	-
16. Kalteng	-	-	-	-	210	0,06	-	-
17. Kalsel	671	0,34	335	0,15	855	0,23	1.702	0,66
18. Kaltim	500	0,25	1.674	0,74	272	0,07	487	0,19
19. Sulut	703	0,35	1.002	0,44	319	0,09	-	-
20. Sulteng	63	0,03	-	-	432	0,12	-	-
21. Suisel	904	0,46	668	0,30	1.170	0,32	-	-
22. Sultra	44	0,02	-	-	242	0,07	-	-
Sulawesi	1.714	0,86	1.670	0,74	2.163	0,60	-	-
23. Maluku	459	0,23	668	0,30	121	0,30	-	-
24. Irian Jaya	233	0,12	-	-	41	0,01	-	-
25. Timor Timur	120	0,06	-	-	20	0,00	-	-
26. Luar Negeri	12.296	6,19	11.364	5,04	1.755	0,48	730	0,28
Jumlah	198.673	35,39	225.393	46,46	363.113	64,61	485.155	53,54

Sumber: BPS,

, Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk, 1980, Seri S, No.2, Jakarta, 1983, Tabel V-2.
, Survei Penduduk Antar Sensus, 1985, Jakarta, 1987, Tabel 1-2.

dengan migran dari D.I. Aceh. Hal ini mungkin karena penduduk Sumatera Barat lebih gemar merantau dibandingkan dengan penduduk dari D.I. Aceh. Diperkirakan bahwa bagian terbesar dari penduduk dewasa laki-laki di Sumatera Barat telah mengalami sekurang-kurangnya sekali dalam hidupnya pergi merantau (Mantra, 1986/1987, hal. 2). Mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan (lihat Tabel 5).

Migran yang berasal dari luar negeri, diduga selain mereka sebagai perwakilan dari negara sahabat, juga mereka ada sebagai tenaga edukatif ataupun sebagai peneliti. Umumnya, mereka bertempat tinggal di kota, tetapi persentasenya menurun dengan berlalunya waktu, demikian juga dengan yang tinggal di daerah pedesaan.

Secara keseluruhan, migran masuk ke Sumatera Utara kebanyakan tinggal di daerah pedesaan walaupun proporsinya menurun, yaitu dari 64,61 persen tahun 1980 menjadi 53,54 persen tahun 1985. Sejalan dengan itu, proporsi migran yang tinggal di daerah perkotaan nampaknya juga meningkat. Hal ini disebabkan terutama, migran yang berasal dari daerah asal migran masuk yang dominan yang tinggal di daerah pedesaan cenderung menurun dan sebaliknya migran yang bertempat tinggal di daerah perkotaan cenderung menaik. Todaro (1983) mengemukakan bahwa perpindahan penduduk ke daerah perkotaan karena adanya perbedaan dalam penghasilan riil antara pekerjaan serta kemungkinan memperoleh pekerjaan baru di kota. Dan Jones (1986) mengemukakan bahwa jaminan kepastian untuk mendapatkan pekerjaan mungkin lebih penting bagi mereka dibandingkan kemungkinan terjadinya perbedaan upah.

5.2. Migrasi Semasa Hidup Keluar

Dicatat bahwa migrasi semasa hidup yang keluar dari Sumatera Utara sebanyak 417.659 jiwa dan 562.885 jiwa masing-masing tahun 1980 dan 1985. Kecuali untuk Timor Timur (tahun 1980), penduduk yang tempat lahirnya di Sumatera Utara ada bertempat tinggal di propinsi-propinsi lain di Indonesia untuk kedua-dua waktu pengamatan tersebut. Daerah sasaran utama migrasi tersebut, di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta di Pulau Sumatera masing-masing adalah D.I. Aceh, Sumatera Barat, dan Riau (Tabel 6). Daerah lainnya menerima migran asal Sumatera Utara di bawah 5 persen

dari masing-masing jumlah migran semasa hidup dari daerah ini.

DKI Jakarta tetap merupakan sasaran utama migran dari Sumatera Utara pada kedua-dua titik waktu pengamatan tersebut, masing-masing sebanyak 36,67 persen dan 34,61 persen. Besarnya persentase migran yang menuju daerah ini, diperkirakan, Jakarta selain sebagai pusat administrasi pemerintahan juga sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pembangunan nasional yang didukung berbagai prasarana merupakan daerah tujuan utama para pendatang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ravenstein (1885) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara migrasi dengan jarak nampaknya didukung oleh data hasil sensus penduduk 1980 maupun SUPAS 1985. D.I Aceh menjadi daerah sasaran yang kedua. "Sumber kekayaan alam yang relatif tinggi, persebaran penduduk yang masih jarang dan tingkat pendidikan/keterampilan yang masih rendah pada sebagian besar penduduk setempat diperkirakan merupakan faktor-faktor yang cukup berpengaruh bagi migran yang menuju Aceh" (Depdikbud, 1982, hal. 108). Sumatera Barat dan Riau merupakan sasaran utama lainnya bagi migran dari Sumatera Utara. Kedua-dua daerah tersebut dekat dengan Sumatera Utara dan yang menjadi batas Sumatera Utara di sebelah Selatan dan di sebelah Utara dengan D.I. Aceh. Selain karena faktor jarak yang dekat, prasarana transportasi yang semakin membaik dan terbukanya Trans Sumatera, diduga karena terdapat dan/atau pembangunan beberapa industri besar di daerah-daerah tersebut. Demikian pula halnya yang menuju Jawa Barat, selain motif ekonomi dan pendidikan, juga dimungkinkan dengan semakin lancarnya arus lalu lintas ke pula Jawa baik melalui darat, maupun udara.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan migran keluar dari Sumatera Utara, yaitu dari 417.659 jiwa tahun 1980 menjadi 562.885 jiwa tahun 1985 atau bertambah sebanyak 34,79%. Migran semasa hidup yang keluar, baik yang bertempat tinggal di daerah pedesaan maupun di perkotaan menunjukkan kenaikan. Di Sumatera, yang tinggal di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di daerah perkotaan. Besar kemungkinan, bahwa migran yang menuju daerah pedesaan mempunyai aktivitas di bidang pertanian di mana sebelum mereka bermigrasi juga mempu-

Tabel 6

Migrasi Semasa Hidup Keluar
Tahun 1980, dan 1985

DATI I	1980		1985	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1. D.I. Aceh	60.983	14,60	91.695	16,29
2. Sumatera Barat	27.234	6,52	35.167	6,25
3. Riau	42.346	10,14	46.231	8,21
4. Jambi	9.951	2,38	11.814	2,10
5. Sumatera Selatan	16.694	4,00	17.164	3,05
6. Bengkulu	2.013	0,48	3.227	0,57
7. Lampung	9.854	2,36	24.828	4,41
Sumatera	169.075	40,48	230.126	40,88
8. DKI Jakarta	153.141	36,67	194.791	34,61
9. Jawa Barat	38.907	9,32	61.613	10,95
10. Jawa Tengah	12.971	3,10	17.539	3,11
11. DI. Yogyakarta	4.691	1,12	5.869	1,04
12. Jawa Timur	15.576	3,73	23.197	4,12
13. Bali	1.306	0,31	871	0,15
14. Nusa Tenggara	987	0,24	756	0,13
15. Kalimantan Barat	3.513	0,84	3.176	0,56
16. Kalimantan Tengah	1.164	0,28	2.236	0,39
17. Kalimantan Selatan	2.387	0,57	4.019	0,71
18. Kalimantan Timur	3.979	0,95	8.863	1,57
Kalimantan	11.043	2,64	18.294	3,25
19. Sulawesi Utara	2.086	0,50	1.184	0,21
20. Sulawesi Tengah	614	0,15	580	0,10
21. Sulawesi Selatan	2.624	0,63	966	0,17
22. Sulawesi Tenggara	614	0,15	727	0,13
Sulawesi	5.938	1,42	3.457	0,61
23. Maluku	1.957	0,47	1.344	0,24
24. Irian Jaya	2.067	0,49	4.907	0,87
25. Timor Timur	-	-	121	0,02
26. Luar Negeri	-	-	-	-
Indonesia	417.659	100	562.885	100

Sumber: - Monografi Migrasi Permanen Propinsi Sumatera Utara; Analisa berdasarkan Data Sensus Penduduk Indonesia 1971 dan 1980, Jakarta - Indonesia, 1986, Tabel 11 dan 12.

- BPS, Survei Penduduk Antar Sensus 1985, Jakarta, 1987
Tabel VII - 1.

nyai aktivitas di bidang yang sama, dan yang tinggal di daerah perkotaan mereka kemungkinan para pekerja di pabrik, instansi pemerintahan dan sebagian ada yang melanjutkan pendidikan.

Di Pulau Jawa, migran yang berasal dari Sumatera Utara kebanyakan tinggal di daerah perkotaan. Diduga, sebagian dari mereka adalah para pemuda yang melanjutkan sekolah, kemudian ada juga yang mempunyai aktivitas di bidang bukan pertanian, seperti pada sektor formal dan sektor informal. Dan yang menuju Daerah Tingkat I lainnya, ke daerah pedesaan cenderung menurun dan ke daerah perkotaan cenderung menaik walaupun dalam persentase kecil (Tabel 7).

5.3. Migrasi Semasa Hidup Neto

Migrasi yang masuk ke Sumatera Utara mengalami kenaikan perubahan arah. Migrasi yang berasal dari Sumatera tampak mengalami kenaikan sedangkan dari Jawa dan Bali cenderung menurun, dan dari wilayah Indonesia lainnya persentase sangat kecil.

Migrasi yang keluar dari daerah Sumatera Utara menunjukkan perubahan arah yang kecil, yang menuju Sumatera cenderung menurun sedangkan yang menuju Pulau Jawa dan Bali serta daerah Indonesia lainnya cenderung menaik. Hal ini terjadi akibat terdapat beberapa Daerah Tingkat I yang menerima migran masuk yang menaik dan/atau menurun.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa, secara keseluruhan migrasi semasa hidup neto tahun 1980 sebanyak 144.127 dan tahun 1985 menjadi -77.730. Ini berarti bahwa tahun 1980 terdapat sebanyak 144.127 jiwa selisih antara migran masuk dengan migran keluar dan tahun 1985 terdapat sebanyak 77.730 jiwa lebih banyak migran keluar dibandingkan dengan migran yang masuk (Tabel 8). Dengan demikian, migran semasa hidup neto untuk Sumatera Utara cenderung makin kecil bahkan menjadi negatif karena jumlah migran yang keluar dari daerah ini cenderung makin membengkak di samping migran yang masuk makin menurun.

Tabel 7
Migrasi Semasa Hidup Keluar
Tahun 1980, dan 1985

D A T I I	Kota				Pedesaan			
	1980		1985		1980		1985	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. D.I. Aceh	13.628	4,80	21.266	5,79	47.355	35,34	70.429	39,05
2. Sumatera Barat	6.445	2,27	12.545	3,41	20.789	15,52	22.622	11,58
3. R i a u	27.079	9,55	33.946	9,24	15.267	11,39	12.285	6,29
4. J a m b i	3.957	1,39	6.500	1,77	5.994	4,47	5.314	2,72
5. Sumatera Selatan	10.786	3,80	8.097	2,20	5.908	4,41	9.067	4,64
6. Bengkulu	874	0,31	1.427	0,39	1.139	0,85	1.806	0,92
7. Lampung	3.398	1,20	8.566	2,33	6.456	4,82	16.263	8,32
Sumatera	66.167	23,32	92.347	25,13	102.908	76,81	137.779	70,53
8. DKI Jakarta	149.155	52,58	170.362	46,35	3.986	2,98	24.429	12,51
9. Jawa Barat	30.834	10,87	44.685	12,16	8.073	6,03	16.928	8,67
10. Jawa Tengah	7.321	2,58	12.362	3,36	5.650	4,22	5.177	2,65
11. D.I. Yogyakarta	3.985	1,40	4.981	1,36	706	0,53	888	0,45
12. Jawa Timur	12.226	4,31	21.582	5,87	3.350	2,50	1.615	0,83
13. Bali	881	0,31	871	0,24	425	0,32	-	-
Jawa dan Bali	204.402	72,05	254.843	69,34	22.190	18,58	49.037	25,11
14. Nusa Tenggara	840	0,30	544	0,15	147	0,11	212	0,11
15. Kalimantan Barat	1.802	0,64	1.680	0,46	1.711	1,28	1.496	0,77
16. Kalimantan Tengah	715	0,25	1.551	0,42	449	0,34	685	0,35
17. Kalimantan Selatan	1.148	0,40	3.789	1,03	1.239	0,92	230	0,12
18. Kalimantan Timur	2.964	1,04	7.161	1,95	1.015	0,76	1.702	0,87
Kalimantan	6.629	2,34	14.181	3,86	4.414	3,29	4.113	2,11
19. Sulawesi Utara	699	0,25	840	0,23	1.387	1,04	344	0,18
20. Sulawesi Tengah	279	0,10	391	0,11	335	0,25	189	0,10
21. Sulawesi Selatan	2.089	0,74	763	0,21	535	0,40	203	0,10
22. Sulawesi Tenggara	67	0,02	414	0,11	547	0,41	313	0,16
Sulawesi	3.134	1,11	2.408	0,66	2.804	2,10	1.049	0,54
23. Maluku	1.217	0,43	505	0,14	740	0,55	830	0,43
24. Irian Jaya	1.290	0,45	2.711	0,74	777	0,58	2.196	1,12
25. Timor Timur	-	-	-	-	-	-	121	0,06
26. Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia	283.679	100	367.539	100	133.980	100	195.346	100

Sumber: BPS. Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 1980, Seri S No.2, Jakarta 1983, Tabel V-2.
Survei Penduduk Antar Sensus 1985, Jakarta, 1987, Tabel VII-1.

6. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN MIGRAN SEMASA HI-DUP DAERAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 disajikan Tabel 9 yang menunjukkan rank (peringkat) PDRB dan PDRB perkapita menurut propinsi di Indonesia. Beberapa hal yang dapat disebutkan dari Tabel 9 adalah:

6.1. Sumatera

Terdapat empat propinsi dengan PDRB yang tidak berubah peringkatnya untuk dua titik waktu pengamatan, yaitu Riau, Sumatera Barat, Lampung, dan Bengkulu. Dilihat dari PDRB perkapitanya, kecuali Lampung, dua daerah lainnya menunjukkan peringkat yang menaik sedangkan Riau tetap di peringkat dua. D.I. Aceh dan Jambi, peringkatnya menaik baik dilihat dari PDRB maupun PDRB perkapitanya. Sumatera Selatan, walaupun peringkatnya menurun dilihat dari PDRB tetapi menurut PDRB perkapitanya malah sebaliknya, menaik dari peringkat keenam menjadi kelima. Dan untuk Sumatera Utara, PDRBnya menurun dari peringkat keenam menjadi kedelapan dan PDRB perkapitanya dari kedelapan menjadi kesebelas untuk tahun 1980 dan 1985.

6.2. Jawa

DKI Jakarta, Jawa Barat, dan D.I. Yogyakarta dilihat dari peringkat PDRB-nya menunjukkan peningkatan sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan penurunan. Jawa Tengah dari peringkat ketiga menjadi keempat dan Jawa Timur dari pertama menjadi kedua. Dan dilihat dari PDRB perkapita, kecuali DKI Jakarta, keempat-empat daerah lainnya menunjukkan peringkat yang semakin menaik.

Tabel 8

Migrasi Semasa Hidup Neto
Tahun 1980 dan 1985

Propinsi	1980	1985
1. D.I. Aceh	1.787	- 25.524
2. Sumatera Barat	47.987	48.081
3. R i a u	- 29.770	- 38.075
4. Jambi	- 8.477	- 11.814
5. Sumatera Selatan	- 10,987	- 13.333
6. Bengkulu	- 1.524	- 2.892
7. Lampung	- 9.097	- 23.914
Sumatera	- 10.081	- 67.471
8. D.K.I. Jakarta	-143.245	-181.096
9. Jawa Barat	- 12.875	- 37.578
10. Jawa Tengah	248.764	161.707
11. D.I. Yogyakarta	997	11.668
12. Jawa Timur	62.275	45.492
13. Bali	- 405	- 203
Jawa dan Bali	153.482	- 10
14. Nusa Tenggara	- 606	- 756
15. Kalimantan Barat	- 2.606	- 3.176
16. Kalimantan Tengah	- 954	- 2.236
17. Kalimantan Selatan	- 861	- 1.982
18. Kalimantan Timur	- 3.207	- 6.702
Kalimantan	- 7.628	- 14.096
19. Sulawesi Utara	- 1.628	- 182
20. Sulawesi Tengah	- 119	- 580
21. Sulawesi Selatan	- 550	- 298
22. Sulawesi Tenggara	- 328	727
Sulawesi	- 2.061	- 333
23. Maluku	- 1.377	- 676
24. Irian Jaya	- 1.793	- 4.907
25. Timor Timur	-	- 121
26. Luar Negeri	- 14.051	- 12.094
Indonesia	144.127	- 77.730

Sumber: Tabel 4 dan 6

6.3. Wilayah Indonesia Lainnya

Kecuali Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya, daerah lainnya menunjukkan peringkat yang semakin menaik dilihat dari PDRB-nya. Akan tetapi dilihat dari PDRB perkapita, kecuali Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, daerah-daerah lainnya menunjukkan peringkat yang menurun, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing tetap di peringkat pertama dan ketujuh.

Dari keadaan-keadaan tersebut di atas ternyata terdapat beberapa daerah yang hasil pembangunan ekonominya berkembang lebih lambat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi untuk daerah Sumatera Utara, di mana peringkatnya makin menurun baik dilihat dari angka PDRB maupun angka PDRB perkapitanya. Mungkin laju pertumbuhan penduduknya yang masih relatif tinggi mempengaruhi pertumbuhan PDRB perkapita penduduknya. Lyn Squire (1986, hal. 212) mengemukakan bahwa secara umum laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi mengakibatkan lebih rendahnya laju pertumbuhan PDRB perkapita dibandingkan dengan keadaan seandainya laju pertumbuhan penduduk tidak naik. Kebanyakan studi tidak menunjukkan hubungan yang jelas antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pendapatan perkapita. Pertumbuhan penduduk hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi laju kenaikan pendapatan perkapita.

Dalam kenyataannya, pertumbuhan penduduk Sumatera Utara mengalami penurunan dari 2,62 persen periode 1971-1980 menjadi 2,47 persen periode 1980-1985, dan PDRB perkapitanya berkembang lebih lambat dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia yang, antara lain ditunjukkan oleh peringkatnya yang menurun. Keadaan ini makin memperbesar keyakinan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan makin besarnya angka migrasi keluar dari Sumatera Utara dan bertempat tinggal di daerah lain.

Tabel 9
 Rank PDRB dan PDRB Per Kapita Menurut Propinsi
 Tahun 1980 dan 1985

No.	Propinsi	PDRB		PDRB Per Kapita	
		1980	1985	1980	1985
1.	D.I. Aceh	9	7	3	3
2.	Sumatera Utara	6	8	8	11
3.	Sumatera Barat	11	11	14	13
4.	R i a u	5	5	2	2
5.	J a m b i	23	19	15	15
6.	Sumatera Selatan	8	9	6	5
7.	Bengkulu	26	26	20	19
8.	Lampung	12	12	23	24
9.	DKI Jakarta	4	3	4	4
10.	Jawa Barat	2	1	13	8
11.	Jawa Tengah	3	4	22	20
12.	D.I. Yogyakarta	17	16	24	22
13.	Jawa Timur	1	2	18	12
14.	Kalimantan Barat	15	14	12	16
15.	Kalimantan Tengah	22	23	7	7
16.	Kalimantan Selatan	18	15	17	9
17.	Kalimantan Timur	7	6	1	1
18.	Sulawesi Utara	16	18	9	18
19.	Sulawesi Tengah	24	24	21	23
20.	Sulawesi Selatan	10	10	16	21
21.	Sulawesi Tenggara	25	25	19	17
22.	B a l i	13	13	11	10
23.	Nusa Tenggara Barat	21	20	26	25
24.	Nusa Tenggara Timur	20	21	25	26
25.	Maluku	19	22	10	15
26.	Irian Jaya	14	17	5	6
27.	Timor Timur	-	27	-	27

Sumber: Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 10

Pertambahan Migran dari Sumatera Utara dan
Peningkatan Pembangunan Ekonomi Propinsi Lain
di Indonesia, 1980 - 1985

No.	Propinsi	Jumlah Migran	PDRB Perkapita
1.	D.I. Aceh	+	T
2.	Sumatera Barat	+	+
3.	R i a u	+	T
4.	Jambi	+	+
5.	Sumatera Selatan	+	+
6.	Bengkulu	+	+
7.	Lampung	+	-
3.	DKI Jakarta	+	T
9.	Jawa Barat	+	+
10.	Jawa Tengah	+	+
11.	D.I. Yogyakarta	+	+
12.	Jawa Timur	+	+
13.	Kalimantan Barat	-	-
14.	Kalimantan Tengah	+	T
15.	Kalimantan Selatan	+	+
16.	Kalimantan Timur	+	T
17.	Sulawesi Utara	-	-
18.	Sulawesi Tengah	-	-
19.	Sulawesi Selatan	-	-
20.	Sulawesi Tenggara	+	+
21.	Bali	-	+
22.	Nusa Tenggara Barat	*)	+
23.	Nusa Tenggara Timur	-	-
24.	Maluku	-	-
25.	Irian Jaya	+	-
26.	Timor Timur	-	-

*) Meliputi NTB dan NTT

T Menyatakan tetap peringkatnya

+ Menyatakan peringkatnya naik (untuk PDRB per kapita) dan jumlah migran bertambah (untuk migran ke luar)

- Menyatakan peringkatnya menurun (untuk PDRB perkapita) dan jumlah migran berkurang (untuk migran keluar).

Sumber: Tabel 6 dan Tabel 9.

Migrasi adalah suatu mekanisme penyeimbang yang akan memindah modal manusia dari suatu tempat yang relatif kurang dimanfaatkan ke daerah yang relatif lebih dapat dimanfaatkan. (Ananta, 1986, hal. 256). Dalam pada itu, sumber daya modal manusia juga cenderung pindah ke daerah yang memberikan imbalan yang secara nisbi lebih tinggi. Ravenstein (1885) dan Lee (1969) mengemukakan bahwa alasan ekonomi merupakan alasan utama berlangsungnya migrasi dan pada umumnya penduduk bermigrasi dari daerah miskin ke daerah kaya (Young, 1984, hal. 109).

Migrasi semasa hidup dari Sumatera Utara umumnya menuju daerah-daerah yang peningkatan pembangunan ekonominya lebih tinggi. (lihat Tabel 10). Masalahnya adalah, apakah penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut ukuran yang berkembang dalam teori-teori pembangunan. Dan apakah migran mengetahui secara pasti bahwa daerah tujuannya mempunyai peningkatan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kelahirannya? Ananta (1986, hal. 256) menyebutkan bahwa migrasi memang merupakan suatu upaya perorangan untuk meningkatkan outputnya. Di suatu wilayah dapat saja penawaran akan sesuatu keahlian relatif telah begitu tinggi terhadap permintaan yang ada sehingga balas jasa untuk pemilik keahlian itu menjadi rendah. Dengan mutu yang sama, orang tersebut dapat memperoleh balas jasa yang lebih tinggi bila ia pindah ke daerah lain yang permintaan akan jasanya yang secara nisbi lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran yang ada di daerah asal. Namun migrasi tidak dijamin selalu berada pada arah yang benar. Walaupun mungkin demikian, nampaknya ada hubungan antara peningkatan pembangunan daerah dengan angka migran yang masuk ke dan keluar dari daerah Sumatera Utara.

7. PENUTUP

Dari beberapa hasil kajian tentang migrasi ternyata, bermigrasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan seseorang. Implikasinya terhadap struktur ekonomi dan sosial terjadi baik di daerah tujuan maupun di daerah asal. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hubungan migrasi dengan pembangunan daerah sangat penting bagi perencana dan

penentu kebijakan. Sebagaimana dikatakan oleh Tommy Firman (1989), kebijaksanaan migrasi hendaknya dipadukan dengan kebijaksanaan pengembangan kota dan wilayah secara rasional sehingga migrasi dapat lebih diarahkan (tidak menuju ke kota-kota tertentu saja) dan lebih menunjang pembangunan nasional sesuai dengan peran ganda yang disandang para migran,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulrochim (1986), **Monografi Migrasi Permanen Propinsi Sumatera Utara Analisa Berdasarkan Data Sensus Penduduk Indonesia 1971 dan 1980**, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alatas, Secha (1987), **Migran Wanita di DKI Jakarta dan Perannya Dalam Ketenagakerjaan (Studi Hasil Sensus Penduduk)**, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ananta, Aris (1986), "Transmigrasi: Suatu Analisis Ekonomi" dalam Swasono, Sri Edi dan Singarimbun, Masri (ed), **Transmigrasi di Indonesia 1905-1985**, U.I. Press, Jakarta.
- Basnafdi (1989), **Pola dan Persebaran Migrasi Untuk Daerah Sumatera Barat (Berdasarkan Sensus Penduduk 1980-SUPAS 1985)**, Program dan Latihan Demografi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik (1983), **Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 1980**, Seri S No. 02, Jakarta.
- (1987), **Penduduk Indonesia Seri SUPAS No. 5**, Jakarta.
- (1982), **Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia 1975-1979**,
- (1987), **Statistik Indonesia 1986**, Jakarta.
- (1989), **Statistik Indonesia 1988**, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1982), **Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh**, Proyek Inventarisasi Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.
- Firman, Tommy, "Migran di Kota Besar", **Kompas**, 20 Maret 1989.
- Jones, Gavin (1986), "Demografi Dalam Kemiskinan di Kota", Dalam Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun (ed), **Kemiskinan di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mantra, Ida Bagus (1988), **Migrasi Penduduk Antar Propinsi di Indonesia Sejak Pembangunan Lima Tahun Pertama**, Makalah, PAU-Studi Sosial UGM, Nopember 1988, Yogyakarta.

- (1986/1987), **Migrasi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1985**, BPS, Jakarta.
- (1985), "Patterns and Characteristics of Population Migration in Indonesia", dalam Hauser, Philip M., et. all (ed), **Urbanization and Migration in ASEAN Development**, National Institute for Research Advancement, Tokyo.
- Naim, Mochtar (1984), **Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sayogya (1986), "Transmigrasi di Indonesia, 1905-1985: Apa yang Kita Cari Bersama", dalam Swasono, Sri Edi dan Singarimbun, Masri (ed), **Transmigrasi di Indonesia 1905-1985**, U.I. Press, Jakarta.
- Squire. Lyn (1986), **Kebijaksanaan Kesempatan Kerja di Negeri-Negeri Sedang Berkembang: Sebuah Survei Masalah-masalah dan Bukti-Bukti**, U.I. Press, Jakarta.
- Temple, Gordon (1986), "Migrasi ke Jakarta", dalam Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun (ed), **Kemiskinan di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Todaro, Michael P. (1983), **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Jilid 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Young, Elspeth (1984), "Migrasi", dalam Lucas, David, et. all., **Pengantar Kependudukan**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.